



Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengolahan Ikan Laut di Dusun Ulo-Ulo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Syamsul Bakhri Gaffar¹, Latang²

Universitas Negeri Makassar
Email: syamsul.bakhri@unm.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemberdayaan perempuan pesisir melalui pelatihan pengolahan ikan laut yang efektif dan efisien; (2) faktor pendukung pelatihan pengolahan ikan laut; (3) faktor penghambat pelatihan pengolahan ikan laut. Subyek penelitian ialah perempuan pesisir baik yang berstatus sebagai istri maupun yang bukan istri nelayan yang berjumlah sebanyak 20 orang. Sumber Data: (1) Data primer dikumpulkan melalui informan yang terdiri dari kepala dusun, dan tokoh masyarakat setempat. (2) Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen, literatur dan jurnal. Teknik pengumpulan data digunakan: observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemberdayaan perempuan pesisir melalui pelatihan pengolahan ikan laut menjadi Abon dan Kripik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien karena sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan identifikasi kebutuhan belajar sehingga materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta. (2) faktor pendukungnya adalah adanya keterbukaan pemerintah dan masyarakat setempat, tersedianya bahan baku berupa ikan segar, dan peralatan pelatihan yang mudah didapat di lokasi pelatihan; (3) Faktor penghambatnya adalah kurang disiplinnya peserta terhadap jadwal waktu pelatihan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan Pesisir, Pengolahan Ikan Laut

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan pengangguran yang terus meningkat secara tajam sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan sekolah dan dampak dari pandemic-19. Pendidikan berperan penting dalam membangun manusia Indonesia se utuhnya. Pemerintah bersama dengan masyarakat berusaha untuk mengatasi dan mengurangi masalah pengangguran dengan jalan mengembangkan dan melaksanakan pendidikan nonformal dalam berbagai program kegiatan. Salah satu di antaranya adalah melalui pelatihan pengolahan ikan yang diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan potensi dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan adanya perluasan akses dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan bagi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui layanan program, layanan fasilitas maupun layanan pendidikan lainnya.

Sebagai konsekuensi masyarakat terus berkembang akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, maka masalah-masalah yang dihadapi

masyarakat pun semakin kompleks. Implikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Teori pembangunan dalam perkembangannya menjadi semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada suatu disiplin ilmu. Dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka.

Implementasi konsep pembangunan selama ini ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantarkan kehidupan mereka menjadi lebih baik bahkan sebagian dapat dikatakan jauh lebih maju. Sementara komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan mereka pada kondisi yang menyengsarakan di mana angka pengangguran dan kemiskinan menjadi semakin bertambah sejalan dengan proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemahaman terhadap pembangunan hendaklah selalu bersifat dinamis, karena setiap saat selalu akan muncul masalah-masalah baru. Pilihan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bukan saja telah mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial, erosi ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Lebih dari itu pendekatan pembangunan tersebut menurut David C. Korten (1997) telah menyebabkan ketergantungan masyarakat pada birokrasi-birokrasi sentralistik yang memiliki sumber daya yang sangat besar, namun tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal, dan secara sistematis telah mematikan inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Terkait dengan itu, Raharjo Adisasmita (2006:166), mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat sebagai aktivitas dilakukan oleh masyarakat, di mana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, maka pembangunan masyarakat dapat dimaknai sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud jika didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap program pembangunan masyarakat yang disusun (disiapkan) harus senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perencanaan dalam menyusun program-program pembangunan atau industri-industri yang membangun kegiatan usaha di suatu daerah termasuk di pedesaan harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan (*Needs Analysis*) harus benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*list of Wants*) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh orang banyak, bukan merupakan keinginan beberapa

orang saja, seperti tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam *Community Development* (pembangunan masyarakat) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma baru pada pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat (pedesaan) pada masa lampau mendasarkan pada azas pemerataan yang penerapannya diarahkan secara sektoral pada setiap desa. Meskipun dana/anggaran/bantuan pembangunan pedesaan jumlahnya relatif besar, tetapi jika dibagi secara merata maka masing-masing desa memperoleh jumlah dana yang relatif kecil, sehingga pemanfaatannya kurang berhasil (Raharjo Adisasmita, 2006). Namun demikian, paradigma pembangunan yang berdasarkan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan masih tetap penting, akan tetapi terdapat pergeseran menuju paradigma pembangunan partisipasi di mana pelaku pembangunan ekonomi masyarakat menuntut adanya kerangka perencanaan pembangunan spesial (tata ruang) mendasar yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan produktivitas masyarakat setempat, yaitu bagaimana dapat mendorong partisipasi masyarakat, terutama keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah, bagaimana menciptakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian antar sektor di tingkat pedesaan dan antar pedesaan, bagaimana menyusun perencanaan dan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pedesaan, bagaimana mengaktualisasikan peran serta masyarakat yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat seperti gotongroyong, rembuk desa, dan lain sebagainya. Perkembangan paradigma baru pembanguana Indonesia saat ini mengacu pada tiga substansi penting, yaitu pemihakan pemberdayaan masyarakat, pemantapan otonomi desentralisasi, dan pemantapan perubahan struktur masyarakat melalui kegiatan sosial ekonomi produktif. Untuk itu di perlukan suatu model pembangunan yang efektif mampu mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan dapat membuka seluas-luasnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi sehingga dapat berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam orde baru paradigma pembangunan mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan. Kapitalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta integrasi dengan pemasaran yang lebih luas (ekspor) dilaksanakan melalui program antara lain, yaitu Bimbingan Massal (Bimas) yang pada hakekatnya merupakan pendekatan "*top down*" yang beroreantasi pada pencapaian target pembangunan. Pendekatan ini mengakibatkan ketergantungan masyarakat desa pada pemerintah. Dalam tatanan ideal pembangunan seharusnya menjadi tanggungjawab bersama antar pemerintah dan masyarakat melalui *community power-nya*, sehingga tidak akan terjadi pengklaiman bahwa pemerintah sebagai penanggungjawab pembangunan. Sentralistik dan uniformalitas yang dibangun oleh orde baru telah menyebabkan lumpuhnya partisipasi dan kreatifitas masyarakat bawah. *State formation* yang sangat ekspansif

telah merusak struktur dan kelembagaan sosial yang telah lama tergantikan dengan struktur dan kelembagaan birokrasi yang sumir dan formalitas, Suparjan & Hempri Suyatno, (2003:20). Dengan demikian proses pembangunan yang dilakukan ternyata tidak mampu mewujudkan tujuan idealnya yaitu memperluas kapabilitas masyarakat dan membuat mereka lebih berdaya. Berangkat dari kegagalan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebut, kemudian muncul gagasan untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan ke arah yang lebih manusiawi. Perubahan tersebut baru menemukan formatnya secara utuh, ketika lahir Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Hal ini menjadi landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah dan dituntut berkekrativitas dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam era reformasi terjadi pergeseran paradigma pembangunan di mana peran pemerintah bukan lagi sebagai "provider" (penyedia) tetapi sebagai "enabler" (fasilitator). Peran sebagai *enabler* berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. Pembangunan masyarakat menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai pengguna akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterahkan masyarakat desa di antaranya melalui pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana halnya yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 26 ayat 3 bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan.

Berdasarkan studi pendahuluan pada awal Juli 2021 diperoleh informasi dari tokoh masyarakat dan beberapa perempuan pesisir menyatakan bahwa di dusun Ulo-ulo desa Belopa terdapat 20 orang perempuan pesisir yang berpotensi untuk mengikuti pelatihan pengolahan ikan laut. Rata-rata mereka yang menyatakan keinginannya mengikuti pelatihan pemberdayaan perempuan karena ingin menambah/meningkatkan pendapatan keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk diteliti tentang "pemberdayaan perempuan pesisir melalui pelatihan pengolahan ikan laut di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu". Hal ini merujuk pada konsep pemberdayaan perempuan pesisir bahwasanya diperlukan pemberdayaan perempuan di sektor perikanan, dengan harapannya agar pemberdayaan perempuan di pedesaan mendapat posisi yang sesuai dengan

kemampuannya misalnya, punya keberanian mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) bagaimana pemberdayaan perempuan pesisir melalui pelatihan pengolahan ikan laut dapat dilakukan secara efektif dan efisien di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu; (2) Faktor apa saja yang merupakan pendukung pemberdayaan perempuan pesisir; dan (3) Faktor apa saja yang merupakan penghambat pemberdayaan perempuan pesisir.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada: (1) perguruan tinggi untuk menambah bahan bacaan tentang pemberdayaan perempuan pesisir melalui pelatihan pengolahan ikan laut; (2) pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan dan instansi terkait yang wilayahnya memiliki potensi perikanan laut, untuk dapat dijadikan sebagai model pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya tentang bagaimana pemberdayaan perempuan pesisir melalui pengolahan ikan laut dalam meningkatkan ekonomi keluarga di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan. Menurut Sukardi (Andi Prastowo, 2011:225) penelitian tindakan adalah cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain. Fokus penelitian ini, yaitu: (1) pemberdayaan perempuan pesisir melalui pengolahan ikan laut dilakukan dengan langkah-langkah secara baik dan benar sehingga proses pelatihannya berjalan efektif dan efisien; (2) faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan pesisir; dan (3) faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan pesisir. Subyek penelitian ialah perempuan pesisir baik yang berstatus istri maupun yang bukan istri nelayan yang berjumlah sebanyak 20 orang.

Agar pengumpulan data dapat dilakukan dengan tepat, maka instrument yang digunakan adalah (1) pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan geografis wilayah penelitian, kebutuhan belajar calon peserta dan sarana/ prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan; (2) pedoman observasi digunakan untuk mengamati tingkat penguasaan dan keterampilan mengolah ikan menjadi Abon dan Kripik oleh peserta. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan mengolah ikan laut menjadi Abon dan Kripik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Abon menunjukkan bahwa terdapat 10 orang atau 40 persen informan menyatakan bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Abon sangat dibutuhkan. 9 orang atau 36

persen menyatakan dibutuhkan, dan 6 orang atau 24 persen informan menyatakan kurang dibutuhkan. Oleh sebab itu dalam merancang pelatihan mengolah ikan menjadi Abon, dapat dijadikan prioritas pertama. Hal itu berarti bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Abon menduduki peringkat satu yaitu sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan mengolah ikan bagi peserta pelatihan.

Data menunjukkan bahwa terdapat 10 orang atau 40 persen informan menyatakan bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi kripik ikan sangat dibutuhkan. 8 orang atau 32 persen informan menyatakan dibutuhkan, dan 7 orang atau 28 persen informan menyatakan kurang dibutuhkan. Dengan demikian skala prioritas kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi kripik ikan menurut informan menduduki peringkat satu yaitu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu dalam merancang pelatihan mengolah ikan menjadi kripik ikan dapat dijadikan prioritas pertama. Hal itu berarti bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi kripik ikan menduduki peringkat satu yaitu sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan mengolah ikan menjadi kripik ikan. Data menunjukkan bahwa terdapat hanya 8 orang atau 32 persen informan menyatakan bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Naget sangat dibutuhkan, 10 orang atau 40 persen menyatakan dibutuhkan, dan 7 orang atau 28 persen informan menyatakan kurang dibutuhkan. Dengan demikian skala prioritas kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Naget menurut informan menduduki peringkat dua yaitu dibutuhkan. Oleh sebab itu dalam merancang pelatihan mengolah ikan menjadi Naget di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, tidak dapat dijadikan prioritas pertama. Hal itu berarti bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Naget menduduki peringkat dua yaitu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan mengolah ikan menjadi Otak-otak di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Data menunjukkan bahwa terdapat 8 orang atau 32 persen informan menyatakan bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Otak-otak sangat dibutuhkan, 5 orang atau 20 persen menyatakan dibutuhkan, dan 12 orang atau 48 persenn informan menyatakan kurang dibutuhkan. Dengan demikian skala prioritas kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Otak-otak menurut informan menduduki peringkat tiga yaitu kurang dibutuhkan. Oleh sebab itu dalam merancang pelatihan mengolah ikan menjadi Otak-otak di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, tidak dapat dijadikan prioritas pertama. Hal itu berarti bahwa kebutuhan belajar pelatihan mengolah ikan menjadi Otak-otak menduduki peringkat tiga yaitu kurang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan mengolah ikan menjadi Otak-otak di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Sebagaimana uraian hasil pengelolaan data secara keseluruhan yang telah diuraikan di atas dan dengan melihat kecenderungan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa terdapat 2 kebutuhan belajar yang skala prioritasnya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan mengolah ikan di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Kebutuhan belajar tersebut yaitu:

kebutuhan belajar mengolah ikan menjadi Abon dan kebutuhan belajar mengolah ikan menjadi kripik. Selain itu terdapat satu kebutuhan belajar yang skala prioritasnya dibutuhkan yaitu kebutuhan belajar mengolah ikan menjadi Naget frekuensinya sangat signifikan untuk dijadikan skala prioritas kedua pada pelatihan mengolah ikan yang diselenggarakan di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, serta terdapat satu kebutuhan belajar yang kurang dibutuhkan pada penyelenggaraan pelatihan mengolah ikan yang diselenggarakan di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, yaitu kebutuhan belajar mengolah ikan menjadi otak-otak.

Hasil identifikasi kebutuhan belajar menunjukkan bahwa kebutuhan belajar yang dinyatakan warga masyarakat yang menduduki peringkat berturut-turut, yaitu: Peringkat Pertama kebutuhan belajar mengolah ikan menjadi Abon dan kebutuhan belajar mengolah ikan menjadi kripik.

Setelah kegiatan identifikasi dilakukan, maka kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan diawali pertemuan bersama dengan Kepala Desa, staf desa, dan tokoh-tokoh masyarakat dengan peneliti dan calon sumber belajar untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk acara pembukaan disepakati diadakan di rumah calon warga belajar. Dalam acara pembukaan tersebut selain dihadiri calon warga belajar juga hadir narasumber, tokoh masyarakat, dan peneliti. Dalam acara pembukaan tersebut, Peneliti sebagai penanggungjawab kegiatan pelatihan memberikan kata pengantar, dan Kepala Desa Belopa memberi sambutan dan membuka acara tersebut secara resmi, yang kemudian dilanjutkan oleh narasumber. Acara selanjutnya adalah membentuk kelompok belajar, yang terdiri atas satu kelompok yang beranggotakan 10 orang setiap kelompok.. Kegiatan pelatihannya dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 26 s.d. 28 September 2021. Kelompok belajar pelatihan ini pelatihannya dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama pelatihan dengan materi mengolah ikan menjadi Abon, tahap ke dua pelatihan mengolah ikan menjadi kripik ikan.

Evaluasi penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan mengolah ikan menjadi Abon dan kripik di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dilakukan bersama pemerintah (Kepala dusun), peneliti, dan narasumber. Model sinergitas tersebut di atas, sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan Hasbi (2012) bahwa pengembangan model sinergitas komponen governance dalam pelayanan pendidikan kecakapan hidup dilakukan melalui empat tahapan. Pertama adalah sinergitas pada tahapan identifikasi kebutuhan layanan, kedua sinergitas pada tahapan persiapan pelaksanaan layanan, ketiga sinergitas pada tahapan pelaksanaan, dan keempat sinergitas pada tahapan evaluasi layanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa pemberdayaan perempuan pesisir melalui pelatihan pengolahan ikan laut menjadi Abon dan Kripik dapat dilakukan secara efektif dan efisien di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu karena sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan identifikasi kebutuhan belajar sehingga materi pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta pelatihan.
2. Bahwa pemberdayaan perempuan pesisir dalam pelatihan pengolahan ikan laut di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu terdapat beberapa faktor yang merupakan faktor pendukung diantaranya adalah keterbukaan pemerintah dan masyarakat setempat menerima peneliti adanya kesediaan masyarakat khususnya calon warga belajar yang bersedia rumahnya ditempati pelatihan, tersedianya bahan baku berupa ikan yang masih segar, dan peralatan untuk pelatihan mengolah ikan menjadi Abon dan Kripik mudah didapat di lokasi pelatihan;
3. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelatihan mengolah ikan menjadi Abon dan Kripik yang dilaksanakan di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu adalah kurang disiplinnya peserta pelatihan terhadap jadwal waktu pelatihan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Program Kemitraan Masyarakat ini dapat terwujud berkat adanya bantuan, kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu tim pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada (1) Rektor Universitas Negeri Makassar Bapak Prof. Dr.H. Husain Syam, M.TP.,IPU yang telah mengalokasikan dana penelitian PNPB dengan SP DIPA 023.17.2.677523/2021, tanggal 23 November 2020 Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 550/UN36/HK/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang memberi kesempatan kepada tim untuk melakukan kegiatan Penelitian dengan judul "Pemberdayaan Perempuan Pesisir melalui Pelatihan Pengolahan Ikan Laut di dusun Ulo-Ulo desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu; (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar yang telah memfasilitasi Tim baik dalam penyusunan proposal, pelaporan hasil penelitian maupun dalam penulisan artikel ini; (3) Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, yang berkenan memberi izin penelitian; (4) Kepala Desa Belopa yang berkenan memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya; dan (5) Tim pelaksana penelitian yang telah menunjukkan kerjasamanya yang sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartasmita, G 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.



- Korten. David C. 1987. *Third Generation NGO Strategis: A Key to People-centered Development*.
- Kusnadi. 2006. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastowo Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suryana, A. dan J. Budianto. 1998. Penawaran, permintaan pangan dan perilaku kebiasaan pangan. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta. hlm. 147- 187.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*.